

## BAB 1

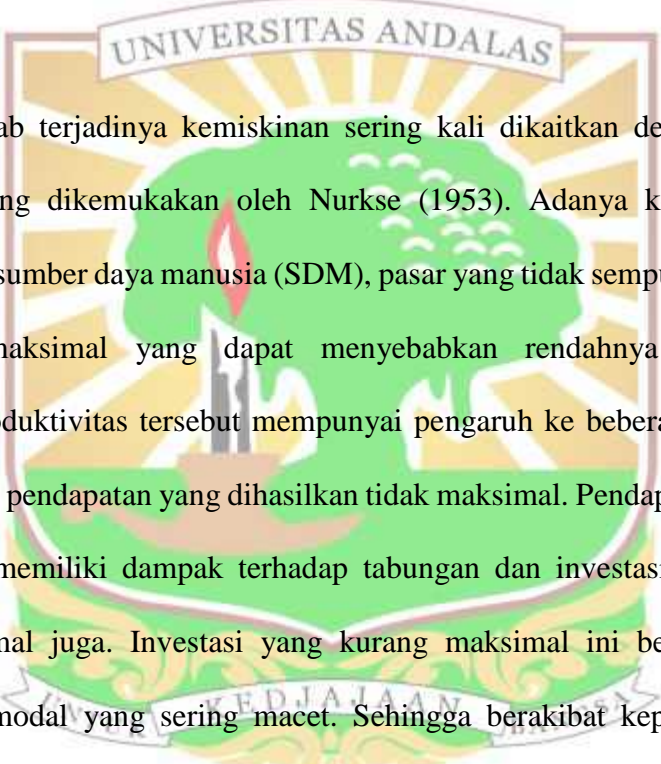
### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Kemiskinan sampai saat ini masih menjadi persoalan yang sangat serius bagi bangsa Indonesia. Persoalan kemiskinan dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas pembangunan nasional di dalam suatu negara. Kemiskinan juga mengakibatkan banyak rakyat yang mana kebutuhan – kebutuhan dasarnya mengalami serba kekurangan dan keterbatasan. Contoh kebutuhannya yaitu: makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kemiskinan juga mengakibatkan generasi muda suatu bangsa buta terhadap pendidikan, kesulitan yang dialami oleh rakyat seperti, sulit untuk mendapatkan pekerjaan, fasilitas kesehatan yang baik dan lingkungan yang bersih serta mengalami serba kekurangan seperti, penghasilan atau pendapatan yang diperoleh rendah, tabungan untuk ditabung juga ikut rendah dan tidak adanya investasi.

Berdasarkan pemaparan tersebut, bahwa keberhasilan pembangunan nasional suatu bangsa dapat dicapai apabila tingkat kemiskinan selalu mengalami penurunan. Kemiskinan masih menjadi persoalan yang sulit dihadapi oleh bangsa Indonesia atau negara dengan kondisi yang dikategorikan masih negara berkembang. Kemiskinan masih menjadi permasalahan yang selalu dikeluhkan oleh rakyat. Karena benar faktanya, sesuai dengan perkataan Adam Smith bahwa jika penduduk di dalam suatu wilayah yang jumlah penduduk miskinnya lebih dominan terhadap penduduk tidak miskin maka dapat diketahui tidak ada masyarakat yang bahagia dan sejahtera. Menariknya kemiskinan merupakan

masalah yang sulit dituntaskan dan begitu rumit. Karena, kemiskinan banyak dipengaruhi oleh faktor – faktor. Seperti, tingkat pengangguran, penghasilan, pendidikan, kesehatan, kelancaran barang dan jasa, geografis, demografis, jenis kelamin dan lingkungan. Karena kemiskinan dipengaruhi oleh banyak faktor, kemiskinan juga menjadi awal sebuah persoalan dari berbagai persoalan yang sulit didalam negara, contohnya kualitas gizi yang rendah, tingkat kriminalitas dan indikator - indikator lainnya yang saling berhubungan (Pantjar dan Saktyanu, 2003).



Penyebab terjadinya kemiskinan sering kali dikaitkan dengan lingkaran kemiskinan yang dikemukakan oleh Nurkse (1953). Adanya keterbelakangan, ketertinggalan sumber daya manusia (SDM), pasar yang tidak sempurna, dan modal yang tidak maksimal yang dapat menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas tersebut mempunyai pengaruh ke beberapa hal. Seperti mengakibatkan pendapatan yang dihasilkan tidak maksimal. Pendapatan yang tidak maksimal ini memiliki dampak terhadap tabungan dan investasi yang menjadi kurang maksimal juga. Investasi yang kurang maksimal ini berakibat kepada pertumbuhan modal yang sering macet. Sehingga berakibat kepada kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia (Kuncoro, 1997).

Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik, persentase kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2011 - 2014 selalu menunjukkan penurunan dengan angka yang ditunjukkan berkisar 8,99 persen, turun menjadi 8 persen, turun menjadi 7,56 persen dan turun menjadi 6,89 persen. Berikutnya pada tahun 2015 persentase kemiskinan justru mengalami kenaikan dengan angka yang ditunjukkan berkisar 7,31 persen. Selanjutnya di tahun 2016 menunjukkan

penurunan dengan angka yang ditunjukkan sebesar 7,09 persen. Tahun 2017 mengalami penurunan kembali menjadi 6,87 persen. Secara garis besar persentase kemiskinan terus menerus turun dari tahun 2011 - 2017. Persentase penurunan dari tahun 2011 - 2017 menunjukkan angka sebesar 2,12 persen.

Kesejahteraan penduduk dapat ditingkatkan dengan salah satu faktor yaitu PDRB perkapita. PDRB merupakan nilai tambah berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk didalam suatu wilayah dengan cara, adanya aktivitas produksi berupa kegiatan ekonomi. Sedangkan yang dimaksud PDRB perkapita yaitu PDRB atau PDRB total yang dibagi dengan angka penduduk pertengahan tahun. Indikator PDRB perkapita sering kali digunakan sebagai indikator yang melihat bagaimana perkembangan pembangunan ekonomi pada suatu daerah. Ketika angka PDRB perkapita menunjukkan kenaikan, maka penerimaan atau pendapatan yang didapatkan oleh penduduk daerah tersebut juga mengalami kenaikan. Berarti ini dapat mengindikasikan bahwa ketika angka PDRB perkapita tinggi maka kondisi penduduk menjadi semakin makmur . Dengan makna yang lain, tingkat kemiskinan akan turun.

PDRB perkapita Provinsi Sumatera Barat mengalami perkembangan yang cukup baik dimana Badan Pusat Statistik (BPS, 2017) mencatat bahwa PDRB per kapita terus mengalami peningkatan. Tahun 2011 PDRB per kapita tercatat sebesar 22.638.750 rupiah . Berikutnya pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 23.744.010 rupiah. Kemudian tahun 2013 PDRB per kapita sebesar 24.857.640 rupiah dan berikutnya tahun 2014 naik menjadi 25.982.830 rupiah. Pada tahun 2015 juga mengalami peningkatan lagi menjadi 27.080.760 rupiah. Tahun 2016 dan 2017 PDRB per kapita kembali mengalami peningkatan 28.164.930 rupiah dan

29.308.240 rupiah. Jadi semenjak tahun 2011 selalu mengalami peningkatan hingga tahun 2017. Sehingga dari tahun 2011 hingga tahun 2017 meningkat sebesar 6.669.490 rupiah.

Berikutnya, jumlah belanja modal dapat digunakan untuk melihat kondisi kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Belanja modal merupakan belanja pemerintah yang digunakan untuk infrastruktur, sarana, prasarana daerah dan menjadi aset di daerah tersebut. Jika penggunaan belanja modal dapat dikelola dengan baik, sesuai dengan manfaat yang diberikannya maka yang di harapkan dari hal ini yaitu mampu memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat terutama mampu mengurangi angka kemiskinan. Dapat kita katakan jika semakin tinggi jumlah belanja modal maka akan menurunkan angka kemiskinan (Hasan, 2010).

Belanja modal Provinsi Sumatera Barat sendiri mengalami perkembangan yang cukup baik. Menurut data yang didapatkan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJP, 2017) mencatat bahwa belanja modal terus mengalami peningkatan. Tahun 2011 belanja modal tercatat sebesar 525 milyar rupiah . Berikutnya pada tahun 2012 belanja modal mengalami peningkatan menjadi 1,225 triliun rupiah. Kemudian tahun 2013 belanja modal sebesar 1,366 triliun rupiah dan berikutnya tahun 2014 belanja modal naik menjadi 1,729 triliun rupiah. Pada tahun 2015 belanja modal juga mengalami peningkatan lagi menjadi 1,877 triliun rupiah. Tahun 2016 dan 2017 belanja modal kembali mengalami peningkatan 1,964 triliun rupiah dan 2,134 triliun rupiah. Jadi sejak tahun 2011 selalu mengalami peningkatan hingga tahun 2017. Sehingga dari tahun 2011 hingga tahun 2017 meningkat sebesar 1,609 triliun rupiah.



Berikutnya faktor yang dapat meningkatkan kemiskinan adalah tingkat pengangguran. Orang yang menanggur adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan. Ketika hal itu terjadi berarti mereka tidak memperoleh sumber pendapatan atau penghasilan. Ketika pendapatan berkurang maka akan meningkatkan kemiskinan. Pengangguran bisa terjadi karena jumlah angkatan kerja yang bertambah, sedangkan jumlah permintaan dari angkatan kerja tidak mengalami kenaikan atau malah berkurang. Selain itu, perusahaan yang tidak lagi beroperasi atau bangkrut menyebabkan pengangguran terus meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi angka pengangguran maka akan meningkatkan tingkat kemiskinan (Amalia, 2012).

Berdasarkan data publikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS, 2017) diketahui bahwa di tahun 2011, angka pengangguran Provinsi Sumatera Barat menunjukkan angka 8,02 persen, berikutnya mengalami penurunan di tahun 2012 menjadi 6,65 persen. Berikutnya di tahun 2013 angka pengangguran mengalami kenaikan menjadi 7,02 persen dan di tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 6,5 persen. Selanjutnya pada tahun 2015 angka pengangguran Provinsi Sumatera Barat mengalami kenaikan menjadi 6,89 persen dan menurun kembali dengan angka 5,09 persen. Terakhir di tahun 2017 angka pengangguran Provinsi Sumatera Barat kembali mengalami kenaikan menjadi 5,58 persen. Namun Secara keseluruhan dari tahun 2011 hingga 2017 angka pengangguran mengalami penurunan sebesar 2,24 persen.

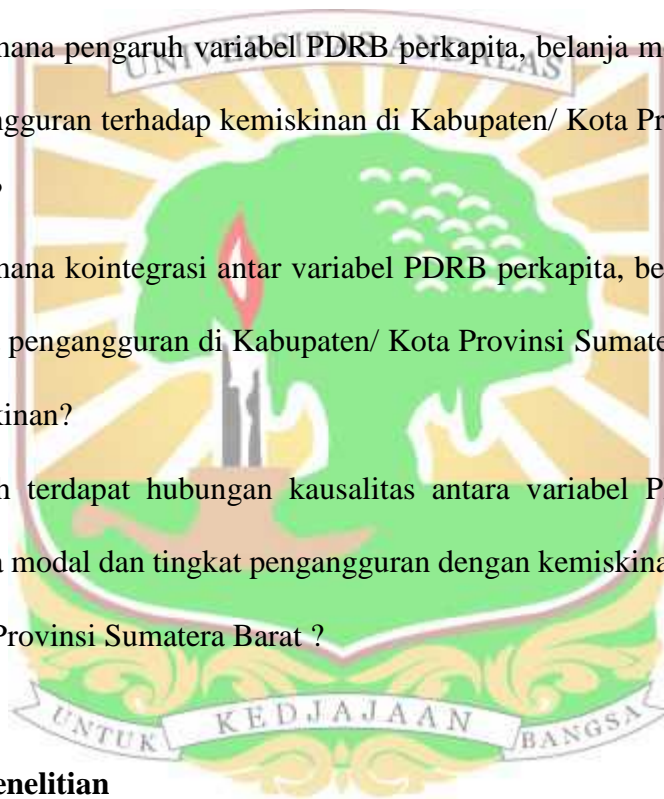
Berdasarkan penjelasan – penjelasan tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Dimana di dalam penelitian ini

akan diketahui bagaimana pengaruh variabel PDRB perkapita, belanja modal dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2011 - 2017.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka perumusan masalah pada penelitian ini dapat dirincikan dengan:

1. Bagaimana pengaruh variabel PDRB perkapita, belanja modal dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Barat ?
2. Bagaimana kointegrasi antar variabel PDRB perkapita, belanja modal dan tingkat pengangguran di Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Barat dengan kemiskinan?
3. Apakah terdapat hubungan kausalitas antara variabel PDRB perkapita, belanja modal dan tingkat pengangguran dengan kemiskinan di Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Barat ?



## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas , maka pada penelitian ini ingin didapatkan beberapa tujuan, yaitu:

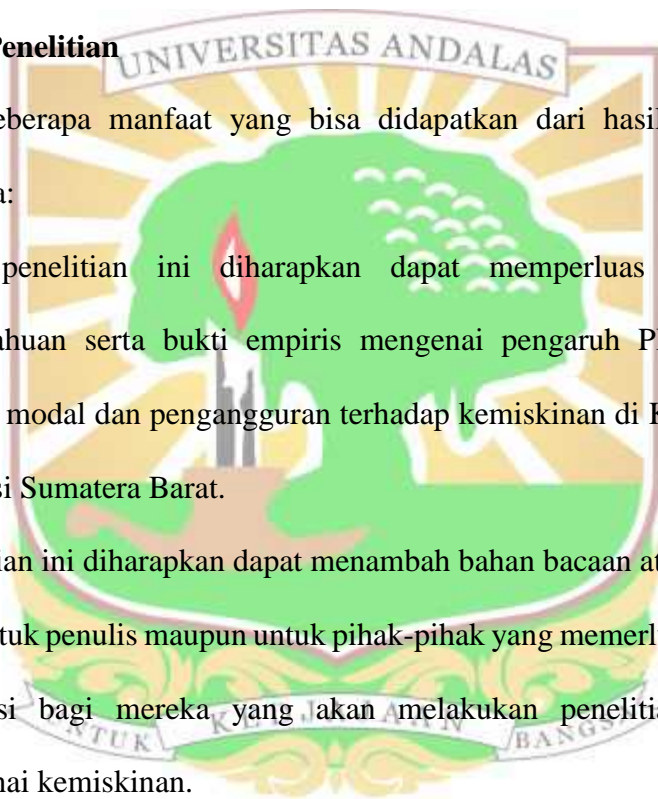
1. Menganalisa pengaruh variabel PDRB perkapita, belanja modal dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Barat.

2. Menganalisa kointegrasi antar variabel PDRB perkapita, belanja modal dan tingkat pengangguran dengan kemiskinan di Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Barat.
3. Menganalisa hubungan kausalitas antara variabel PDRB perkapita, belanja modal dan tingkat pengangguran dengan kemiskinan di Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Barat

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari hasil penelitian ini, diantaranya:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan serta bukti empiris mengenai pengaruh PDRB perkapita, belanja modal dan pengangguran terhadap kemiskinan di Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Barat.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan bacaan atau kepustakaan baik untuk penulis maupun untuk pihak-pihak yang memerlukannya sebagai referensi bagi mereka yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kemiskinan.
3. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk dapat menurunkan lagi angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.



## 1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Agar lebih terarahnya pembahasan dalam penelitian ini maka perlu adanya batasan, maka batasan ini di fokuskan pada PDRB perkapita, belanja modal dan pengangguran di Provinsi Sumatera Barat yang menggunakan data sekunder periode 2011 – 2017.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Pada peneltian ini digunakan sistematika penulisan yang berfungsi untuk mempermudah penulisan pada penelitian ini, sitematika penulisan pun dibagi menjadi enam bab,sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bagian ini terdapat beberapa bagian yang dapat dijabarkan atas, latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN LITERATUR**

Pada bagian ini terdapat beberapa teori yang dapat menunjang penelitian serta penelitian - penelitian terdahulu yang bisa dijadikan sebagai panduan atau bahan acuan yang digunakan dalam hal penulisan. Ada juga kerangka analisis untuk penelitian dan seperti apa hipotesis atau dugaan sementara terhadap penelitian.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bagian ini memuat tentang penjelasan mengenai lokasi penelitian, data dan sumber data, pengertian dari variabel yang diteliti dan metode analisis data yang di gunakan.



**BAB IV : GAMBARAN UMUM**

Pada bagian ini memuat tentang gambaran dasar terhadap penelitian yang dilakukan. Bagaimana kondisi umum daerah penelitian tersebut

**BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini memuat tentang hasil penelitian dari penelitian yang telah di proses beserta penjelasan – penjelasa yang dapat diberikan dari hasil penelitian.

**BAB VI : PENUTUP**

Pada Bagian ini berisikan rangkuman atau kesimpulan dari hasil penelitian dan saran – saran yang bisa diberikan terhadap penelitian.

